

RENMINBI SEBAGAI PESAING KUAT DOLAR AS DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Febri Dirgantara Hasibuan¹, Rahmad Cherry², Nurhaliza Rahma Damanik³, Ananda Arifah Larasati⁴

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹²³⁴

Abstract

The strengthening dominance of the US dollar in the Southeast Asian region has made countries in the region start to worry and try to release their dependence on this currency. This phenomenon is a great opportunity for China in carrying out its ambition to expand the influence of the renminbi (RMB) as a medium of exchange for international transactions, and one of the areas that count as a great concern to China in Southeast Asia. In achieving this ambition, China is continuously increasing its cooperation with countries in the Southeast Asian region, making the renminbi stronger to become inter-regional transactions between China and countries in Southeast Asia. This study aims to see how strong the renminbi's opportunity in Southeast Asia is to become a strong competitor for the US dollar. This study is using a qualitative method, through secondary data sources such as journals, scientific articles, and reports. The results of this study is to see has the renminbi succeeded in countering the US dollar's dominance in the Southeast Asian region by increasing its cooperation with Southeast Asian countries, so that it can be called a strong competitor.

Keywords: *The Renminbi, The US Dollar, Cooperation, National Interest, Southeast Asia*

Abstrak

Menguatnya dominasi dolar AS di kawasan Asia Tenggara membuat negara-negara di kawasan mulai khawatir dan berusaha melepaskan ketergantungannya terhadap mata uang ini. Fenomena ini merupakan peluang besar bagi China dalam menjalankan ambisinya untuk memperluas pengaruh renminbi (RMB) sebagai alat tukar transaksi internasional, dan salah satu wilayah yang diperhitungkan sebagai perhatian besar China di Asia Tenggara. Dalam mencapai ambisi tersebut, Tiongkok terus meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, menjadikan renminbi semakin kuat menjadi transaksi antar kawasan antara Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kajian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat peluang renminbi di Asia Tenggara untuk menjadi pesaing kuat dolar AS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui sumber data sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan laporan. Hasil penelitian ini adalah untuk melihat apakah renminbi berhasil melawan dominasi dolar AS di kawasan Asia Tenggara dengan meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara Asia Tenggara, sehingga dapat disebut sebagai kompetitor yang kuat.

Kata Kunci: Renminbi, Dolar AS, Kerjasama, Kepentingan Nasional, Asia Tenggara

Copyright (c) 2022 Febri Dirgantara H¹, Rahmad Cherry², Nurhaliza Rahma D³, Ananda Arifah⁴.

✉ Corresponding author : Febri Dirgantara Hasibuan

Email Address : febri.dirgantara@uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

China sebagai negara dengan kekuatan sumber daya manusia yang potensial untuk menggerakkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik dalam sistem internasional mulai berambisi untuk menjadi hegemoni, baik secara regional maupun internasional. Dengan meningkatnya pangsa pasar renminbi (RMB) dalam transaksi perdagangan dan keuangan di kancah internasional, menjadikan RMB sebagai mata uang ke-4 setelah dolar AS, euro, dan pound sterling. Banyak negara yang menggunakan RMB untuk pembayaran internasional mereka sehingga terjadi lonjakan dalam jumlah transaksi penggunaan mata uang China itu selama beberapa tahun terakhir yang menjadikan fenomena ini sebagai peningkatan yang signifikan bagi renminbi, China melihat fenomena ini sebagai peluang untuk mempromosikan penggunaan RMB secara internasional.

Pada akhir Juni 2022, People's Bank of China (PBoC) – bank sentral China – menandatangani perjanjian pengaturan baru tentang likuiditas yang disebut Renminbi Liquidity Arrangement yang bertujuan untuk memberikan dukungan likuiditas bagi bank sentral partisipan saat terjadi periode volatilitas pasar di waktu yang akan datang. Perjanjian ini mencakup bank sentral milik beberapa negara di Asia Tenggara (Bank Indonesia, Central Bank of Malaysia, Monetary Authority of Singapore). Negara-negara tersebut di atas juga memperbarui perjanjian dengan PBoC untuk mengurangi penggunaan dolar AS dalam *cross-border payments*. Diikuti dengan Thailand, Laos, Cambodia dan Myanmar, semua mengumumkan bahwa mereka berupaya untuk mengurangi

penggunaan dolar AS sebagai *intermediary of cross-border payments*. Alasan untuk meninggalkan dolar AS ini tidak lain karena disebabkan oleh rasa khawatir mereka apabila terkena sanksi serupa dengan yang diperoleh Rusia pasca penyerangan Ukraina (Hao, Han, dan Li 2022).

Dalam mencari opsi lain untuk beralih dari SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications*) negara-negara ini menghindari *Western banks* dan clearinghouses milik Barat. Kemudian satu-satunya yang dapat menjadi alternatif adalah China dengan CIPS (*Cross-border International Payment System*). China memiliki bank besar yang aktif secara internasional, dan telah memiliki lembaga kliring-nya sendiri untuk melakukan transaksi lintas batas (*cross-border transactions*) serta China juga telah memulai kampanye untuk mendorong penggunaan mata uangnya secara internasional, yaitu renminbi (RMB) (Eichengreen, Barry, dan Kawai 2015).

Sikap antusias pemerintah China untuk melakukan internasionalisasi renminbi muncul atas respon China kepada krisis finansial AS 2008 yang menimbulkan kekhawatiran China terhadap performa ekonomi AS yang akan mempengaruhi *dollar-denominated assets* (aset yang menggunakan mata uang dolar) yang dimiliki oleh China (termasuk cadangan devisa dan aset sekuritas AS) (Chey 2013).

Perihal ambisi internasionalisasi renminbi menjadi mata uang dominan, China terlihat memiliki peluang dan kekuatan di kawasan regional Asia Tenggara, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu instrumen politik luar negeri China dalam mengejar kepentingan ekonomi dan keamanan. Serta tingginya tingkat kerjasama China dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara membuat China memiliki peluang untuk menjadi hegemoni di kawasan ini. Tampaknya pemerintahan China telah menetapkan tujuan untuk mengembangkan potensi renminbi menjadi mata uang dominan dimulai dengan Asia, terlihat dari langkah yang ditempuh China dengan menginisiasi kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian pembahasan dalam jurnal ini.

Selain itu, peluang China menjadi kekuatan hegemoni regional di kawasan Asia Tenggara didukung oleh fenomena berkurangnya ketergantungan negara-negara di kawasan terhadap dolar AS pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan depresiasi mata uang dolar AS serta instabilitas ekonomi yang berimbas kepada penyusutan likuiditas global. Negara di kawasan tidak bisa terus bergantung dengan dolar di keadaan seperti berikut. Penelitian ini menyelidiki seberapa kuat renminbi sebagai mata uang China menjadi pesaing dolar AS di kawasan Asia Tenggara.

THEORETICAL FRAMEWORK

Dalam membantu menjawab penelitian ini, penulis menggunakan konsep kerjasama dalam menganalisis fenomena tersebut. Kerjasama merupakan salah satu konsep paling umum dalam studi hubungan internasional, kerjasama antar aktor-aktor Hubungan Internasional telah menjadi banyak perhatian banyak sarjana Hubungan Internasional dalam kurun waktu yang cukup lama, membuat perkembangan konsep kerjasama lebih luas daripada apa yang sebelumnya ada dalam studi ini. Salah satu pemikir Hubungan Internasional, Robert Keohane, mengatakan bahwa kerjasama dapat

terjadi ketika aktor-aktor dalam hubungan internasional melakukan penyesuaian *behavior* mereka dengan preferensi pihak lain yang aktual dan diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan. (Robert O. Koehane 2006) Kerjasama internasional kini tidak lagi hanya negara dengan negara saja, namun juga antara *state* dan *non-state* seperti perusahaan-perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah dan sebagainya. Menurut Kalevi Holsti, kerjasama internasional dapat terjadi dengan adanya beberapa faktor, sebagai berikut: (Holsti 1981)

- Terdapat dua atau lebih tujuan, kepentingan, atau nilai yang saling bertemu sehingga menghasilkan sesuatu atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- Terdapat harapan dari suatu aktor bahwa kebijakan yang diputuskan oleh aktor lainnya dapat membantu aktor tersebut dalam mencapai kepentingannya.
- Terdapat sebuah norma atau aturan resmi maupun tidak resmi mengenai transaksi yang akan terjadi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan tertentu.
- Terdapat persetujuan terhadap permasalahan tertentu antara dua aktor atau lebih dalam rangka menjaga kepentingan bersama.
- Transaksi antar aktor yang dilakukan untuk memenuhi tujuan aktor-aktor tersebut.

Kerjasama antara China dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

Konsep yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *national interest* (kepentingan nasional). Konsep kepentingan nasional merupakan termasuk konsep awal dalam studi Hubungan Internasional bahkan hingga kini konsep tersebut masih mampu menjadi pisau analisis untuk menjawab berbagai fenomena di ranah internasional. Menurut Theodore, *national interest* memang masih dapat menjadi konsep yang amat penting dalam upaya memahami, menjelaskan, menggambarkan, serta memprediksikan perilaku sebuah negara dalam bertindak di ranah internasional. Kepentingan nasional memiliki berbagai definisi dari para sarjana Hubungan Internasional, misalnya menurut Burchill, kepentingan nasional merupakan motivasi sebuah negara dalam menjalankan hubungan luar negeri negara tersebut. (Burchill 2005) Sedangkan menurut Devetak, kepentingan nasional merupakan sebuah istilah yang mengacu pada tujuan kebijakan luar negeri suatu negara—dimana terlepas siapapun pemerintah yang berkuasa jika memiliki agenda dan ideologi yang sama, maka kepentingan nasional suatu negara tersebut relatif sama, namun jika memiliki agenda dan ideologis yang berbeda, maka kepentingan nasional suatu negara tersebut akan berubah. Adapun Morgenthau menganggap bahwa kepentingan nasional suatu negara pada dasarnya merupakan *power*, dimana dalam kondisi sistem anarki, negara-negara dipaksa untuk meningkatkan *power*-nya dan menjadi tujuan utama negara berdaulat. (Devetak, Burke, dan George 2012)

Donald Nuechterlein membagi kepentingan nasional menjadi empat kebutuhan dasar dari kebijakan luar negeri, sebagai berikut:

- *Defence interests*, kepentingan sebuah negara dimana negara tersebut berusaha melakukan perlindungan kepada negara dan warga negaranya dari ancaman fisik yang mungkin diarahkan dari negara lain, dan/atau ancaman dari luar terhadap sistem pemerintahannya.
- *Economic interests*, kepentingan sebuah negara dimana negara tersebut berusaha untuk meningkatkan ekonominya agar mencapai kesejahteraan dalam hubungan dengan negaranegara lain.
- *World Order interests*, kepentingan pemeliharaan sistem politik serta ekonomi internasional, di mana negara dapat merasa aman serta dapat berinteraksi secara damai dengan pihak luar batas negaranya.
- *Ideological interests*, kepentingan dalam melakukan perlindungan dan kelanjutan dari seperangkat nilai-nilai yang diyakini dan dianut oleh masyarakat suatu negara secara universal.

Aspek kepentingan ekonomi China dalam memperluas jangkauan penggunaan renminbi sebagai alat transaksi lintas batas negara, akan menjadi aspek kepentingan yang paling diperhatikan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif memperluas langkah-langkah analisis data dan metode, sehingga dapat menyajikan data, menafsirkan, memvalidasi, serta menunjukkan hasil penelitian (John W. Creswell 2014). Oleh karena itu, penulis menggunakan metode kualitatif agar penelitian ini dapat menyajikan sebuah analisa yang luas dan mendalam-dengan memperhatikan seluruh variabel yang terlibat di dalamnya. Data yang akan kami gunakan merupakan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui pelbagai literatur yang sesuai dengan fenomena yang dianalisis, seperti artikel, jurnal *online*, buku, laporan-laporan serta karya ilmiah lainnya. Setelah sumber-sumber terkumpul, sumber atau data yang telah diperoleh kemudian dibandingkan atau perbandingan literatur, kemudian barulah melakukan validitas data dengan menyesuaikan terhadap fakta empiris yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asia Tenggara Mulai Melepas Ketergantungan Dari Dolar AS

Dollar AS sebenarnya bukanlah merupakan mata uang internasional, melainkan dollar lebih tepat dikatakan sebagai mata uang negara tertentu dan kawasan tertentu. Dalam ranah internasional, mata uang setiap negara berbeda-beda dan hal tersebutlah yang menyebabkan sistem moneter dan finansial global tidak simetris. Maka dari itulah sebenarnya dunia membutuhkan satu mata uang yang dapat menjadi patokan untuk dilakukannya transaksi agar mempermudah proses jual-beli di lingkup internasional. Alasan mengapa banyak sekali negara-negara di dunia saat ini menjadikan dollar sebagai mata uang internasional adalah karena dollar AS merupakan salah satu mata uang yang pergerakannya relatif stabil. Selain itu, terdapat sejarah panjang mengenai dollar AS yang pada akhirnya dapat dijadikan mata uang dunia, salah satu diantaranya adalah ekonomi Amerika Serikat pernah menjadi yang terkuat

mengalahkan Inggris pada masa-nya, sampai dimana ketika Inggris mulai meninggalkan standar emas dan menjadikan dollar untuk menggantikan pound sebagai mata uang cadangan internasional. Pada dasarnya, dollar beredar di dalam AS kisaran 50 persen saja dan 50 persennya lagi beredar di luar wilayah AS. Berdasarkan hal tersebut, jika semisal AS melakukan penyerangan kepada suatu negara maka secara tidak langsung negara-negara lain juga ikut berkontribusi pendanaan penyerangan tersebut. Dengan begitu, wajar jika AS memiliki kemampuan memonopoli pasar global (Vivi Kumalasari Subroto 2021).

Negara-negara di Asia Tenggara masih banyak menggunakan dollar AS untuk transaksi jual beli antar negara, tetapi dalam tiga tahun terakhir, banyak negara yang secara tidak sengaja berusaha mengubah keadaan dengan alasan untuk mempertahankan perekonomian dalam negeri mereka. Dollar AS tidak selama nya mengalami kestabilan, dibuktikan dengan terjadinya inflasi yang luar biasa di negara Amerika Serikat pasca pandemi Covid-19. Penyebab dari inflasi tersebut dikarenakan terjadinya gangguan dalam supply chain akibat pandemi Covid-19, perang UkrainaRusia, dan juga terdapat beberapa bencana kekeringan di sejumlah wilayah AS. Dengan terjadinya inflasi domestik tersebut, maka berakibat pemerintah AS menaikkan suku bunga melalui bank sentral AS yaitu The Fed (Federal Reserve) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat inflasi domestik tersebut yang terus melonjak. Selama The Fed menetapkan kebijakan moneter nya dengan cara yang stabil dan dapat diprediksi, maka implikasi negatif untuk seluruh dunia dapat di minimalisir. Keputusan The Fed dalam menaikkan suku bunga ini sangat berdampak kepada negara-negara di Asia khususnya Asia Tenggara dikarenakan kenaikan ini dapat menyusutkan likuiditas global.

Selain itu, pengetatan moneter di AS dapat menjadikan investor menarik uang mereka keluar dari ekonomi Asia karena dapat berakibat terjadinya depresiasi mata uang di sebagian besar ekonomi. Akibat adanya depresiasi mata uang tersebut menjadikan impor makanan dan energi yang lebih tinggi, neraca transaksi berjalan menjadi tidak seimbang, dan juga dapat mempersulit negara-negara di Asia Tenggara untuk membayar impor sekaligus utang luar negerinya (Nindya Aldila 2022). Hal tersebut yang menjadikan negara-negara di Asia Tenggara perlahan mulai mengurangi penggunaan dollar AS untuk transaksi internasional negaranya. Kenaikkan suku bunga The Fed diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2023 mendatang. Disamping keadaan AS yang sedang memperbaiki perekonomiannya yang ditandai dengan lemahnya dollar AS, mata uang yang berada di negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengalami penguatan yang dapat dibuktikan dengan terkoreksinya dollar AS di pasar spot. Faktor yang menjadi alasan mengapa mata uang negara-negara di Asia Tenggara tetap stabil ditengah gempuran lemahnya dollar AS adalah dikarenakan banyak dilakukan eksportir komoditas yang membuat negara-negara Asia Tenggara dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ranah domestik demi mencapai stabilitas ekonomi makro (Hadijah Alaydrus 2022).

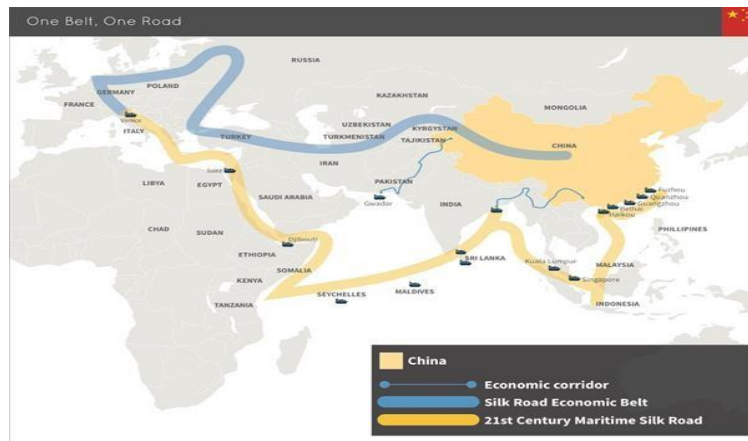
Dominasi dolar AS sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Dollar US menjadi salah satu mata uang yang dipilih oleh Bank Commonwealth dengan tersedianya valuta asing yang digunakan sebagai alat transaksi yang sah dan diakui untuk kegiatan transaksi internasional. Dominasi dollar AS ini

menyebabkan terjadinya beberapa implikasi. Yang pertama, AS dapat dengan mudah menjalankan transaksi berjalan tanpa menghadapi suatu krisis tertentu agar dapat melakukan kebijakan ekonomi makro dengan mengabaikan tekanan dari eksternal dan juga terhindarnya AS dari kendala trilema kebijakan yang dimana dalam konsep trilema kebijakan, si pembuat kebijakan dapat memilih dua dari tiga tujuan kebijakan yaitu pengelolaan nilai tukar, keleluasaan arus modal, dan otonomi kebijakan moneter. Kedua, dengan terjadinya dominasi dollar AS berarti kebijakan moneter oleh bank sentral AS (Federal Reserve/ The Fed) akan mempengaruhi banyak negara berkembang. Ketiga, mata uang negara lain menjadi terbatas yang akan menimbulkan permasalahan ekonomi dalam memperoleh likuiditas internasional ketika dibutuhkan seperti yang terjadi ketika krisis keuangan global.

Berdasarkan pernyataan tentang dominasi dolar AS tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa dominasi dollar AS akan mengalami batas waktu. Terdapat banyak peluang dan potensi untuk menggeser dominasi dollar AS ke mata uang negara di luar AS yang juga memiliki populasi yang lebih besar seperti euro, yen, yuan, dan lain sebagainya. Mata uang yang dapat bersaing dengan dollar AS adalah mata uang yang dapat membentuk perbankan yang sudah terintegrasi dengan baik dan dapat mengembangkan pasar keuangan yang luas dan likuid. Untuk yuan sendiri memiliki peluang yang besar pada saat ini dikarenakan sudah banyak penelitian yang menjelaskan terkait prediksi bahwa kegiatan perekonomian di China akan melampaui AS dalam PDB nominal di pasar valuta asing sekitar tahun 2030 mendatang yang membuat negara China dapat membuat mata uang yuan menjadi mata uang internasional jika dapat melakukan reformasi struktural secara mendalam dan dapat mencapai neraca modal yang terbuka penuh (Sonny 2020).

B. Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Sebagai Langkah China Menjadi Kekuatan Hegemoni

Belt and Road Initiative (BRI) yang terlebih dahulu dikenal sebagai One Belt One Road (OBOR) adalah proyek besar China yang diinisiasi oleh Presiden Xi Jinping di tahun 2013 yang berbentuk kebijakan ekonomi dan geopolitik, ini merupakan inisiatif paling ambisius yang pernah dibuat di abad ke-21 dan akan melibatkan 71 negara dari tiga benua dengan total populasi sekitar 4,4 miliar jiwa (Thaher 2022). Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memperkuat jaringan infrastruktur, perdagangan, dan memperkuat konektivitas dan kooperasi dalam skala trans kontinental. Belt and Road Initiative dapat dianggap sebagai alat kepentingan nasional China dalam mengamankan pasokan energi dan ambisi China dalam mengambil alih kepemimpinan di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, BRI juga merupakan bentuk upaya China untuk membangun hegemoni di bidang ekonomi dan keamanan. Kebijakan ini juga sebagai instrumen investasi antara China dengan negara-negara dalam cakupan wilayah Eurasia (Cai 2017).



Sumber: *Understanding China's Belt and Road Initiative*

Istilah *belt* memiliki makna kepada mengenai serangkaian jalan darat, jalur pipa, kereta api dan infrastruktur lainnya melalui Asia Tengah, sampai ke benua Eropa. Sedangkan *Road* mengacu kepada serangkaian pelabuhan dan jalur-jalur perdagangan maritim yang masuk melalui Laut China dan Samudera Hindia ke Timur Tengah, pantai timur Afrika dan seterusnya sampai dengan benua Eropa. Kebijakan ini dibuat oleh China berdasarkan nilai historis, empiris dan praktis. Menurut sejarah berdirinya China bahwa jalur perdagangan ini telah ada sejak berabad-abad ke belakang, maka melalui kebijakan ini Presiden Xi ingin mencoba membuka kembali jalur sutra tersebut dengan menegaskan bahwa program ini akan menjadi fokus kebijakan luar negeri pada era kepemimpinannya dan menjadi diplomasi ekonomi bagi China. Dengan demikian menunjukkan kebijakan ini digunakan sebagai alat *soft power* dalam kebijakan luar negeri China kepada negaranegara di benua Asia dalam beberapa tahun ke depan (Wijaya 2020).

Melalui BRI sebagai alat untuk menciptakan hegemoni China, negara tirai bambu itu menancapkan pengaruhnya di berbagai belahan dunia, salah satunya di kawasan yang mulai dicoba untuk dikuasai di dunia adalah kawasan Asia Tenggara. China terus meningkatkan upayanya untuk membuat penggunaan mata uang renminbi semakin lumrah dilakukan di kawasan Asia Tenggara, salah satu jalan yang ditempuh dalam mengerjakannya yaitu melalui program pinjaman *Belt and Road Initiative*-nya. Sampai dengan tahun 2016, menurut CEO HSBC Malaysia, Mukhtar Hussain, proyek BRI telah tersebar ke delapan negara ASEAN dengan nilai investasi \$1.77 miliar dalam bentuk 300 perusahaan China yang dibangun di 26 zona kerja sama ekonomi (The Star China, 2017). Ada beberapa alasan yang kuat mengapa China memilih menjadikan Asia Tenggara sebagai target investasinya karena Asia Tenggara melalui ASEAN menjadi jalur yang dipilih China untuk mengimplementasikan BRI. Keterbukaan perdagangan ASEAN-China sudah dimulai sejak perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada tahun 2010 ("China's BRI Seen Boosting Trade with ASEAN to US\$2.1 Trillion" 2017).

China berusaha untuk memprioritaskan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam pelaksanaan kebijakan BRI agar terciptanya terwujudnya keinginan China untuk menjadikan China-ASEAN menjadi sebuah komunitas yang saling menguntungkan satu sama lain. Alasan China memilih ASEAN

sebagai mitra dalam melakukan berbagai kerjasama adalah karena negara ASEAN berada di sepanjang jalur sutra maritim yang menjadi wilayah strategis dan memudahkan untuk melakukan mekanisme kerjasama multilateral. Kerjasama antara China-ASEAN sudah berlangsung selama bertahun-tahun yang ditandai dengan perjanjian perdagangan bebas (FTA) pertama di kawasan Asia Tenggara. Menurut salah satu riset mengatakan bahwa BRI telah menawarkan beberapa pinjaman untuk negara-negara Kawasan ASEAN, diantaranya RMB 3 miliar (US\$ 440 juta) untuk dana Kerjasama, RMB 50 juta (US\$ 7,35 juta) untuk dana pencegahan dan penanggulangan bencana, RMB 200 juta (US\$ 29,4 juta) untuk Kerjasama regional Asia, US\$ 3 miliar untuk China-ASEAN Kerjasama investasi dan US\$ 10 miliar untuk pinjaman khusus pembangunan infrastruktur China-ASEAN. Dengan melakukan penawaran tersebut, China mendapatkan banyak keuntungan investasi dan juga memberikan banyak pengaruh geopolitik di Kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disambut baik oleh ASEAN yang dibuktikan dengan para Menteri ASEAN angkat bicara perihal BRI China di pertemuan KTT Asia Timur pada tahun 2016. Banyaknya proyek BRI yang didukung oleh negara-negara ASEAN karena menurut masyarakat ASEAN proyek tersebut banyak memberikan jalan bagi mereka untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi jangka Panjang khususnya dalam bidang infrastruktur di masing-masing negara(Gong 2019).

China berfokus untuk memberikan pelayanan, melalui CIPS (Cross-border Interbank Payment System) yang mewadahi bank sentral negara-negara dalam melakukan bisnis keuangan lintas-batas. China juga menggunakan CIPS sebagai alat keuangan yang signifikan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan di negara-negara di sepanjang Belt and Road Initiative (BRI)(“Western Sanctions Spark Anxiety among Businesses over Dollar Hegemony” 2022). Terdapat kepentingan nasional China dalam mengupayakan hal ini yaitu mengambil alih negara-negara kawasan agar menggunakan CIPS daripada menggunakan SWIFT sebagai *intermediary cross-border payment*. Diusung dengan kebijakan BRI, rencana ini terlihat bisa direalisasikan dengan lebih mudah. Menurut Belt & Road News Network, China telah memulai meningkatkan penggunaan renminbi untuk transaksi bilateral dengan banyak negara di Asia Tenggara, mulai dari Kamboja hingga Vietnam. Kamboja pertama kali melakukan *direct transaction* valuta asing menggunakan renminbi (Jing 2022). BRI memiliki peran yang signifikan untuk menyokong kelancaran internasionalisasi renminbi di kawasan Asia Tenggara dengan kenyataan bahwa selama periode Januari-November 2021 transaksi lintas batas dalam pasar BRI meningkat sejauh 25% dengan total 5,1 triliun RMB, berdasarkan laporan dari China National Radio Report. Pebisnis dalam negeri atau pemerintah yang pasti sering melakukan transaksi lintas-batas negara merasa diuntungkan karena beralih ke CIPS yang lebih convenient karena standar transceiver milik CIPS bisa mengatasi masalah yang ditemui saat melakukan proses kliring lintas-batas sebelumnya yang bukan dengan CIPS.

C. Renminbi Sebagai Kompetitor Kuat Dolar AS di Kawasan Asia Tenggara

Perkembangan renminbi sebagai alat tukar sudah semakin menguat, tidak hanya dari segi nasional, bahkan internasional, terutama regional seperti Asia Tenggara. China memiliki kepentingan untuk menguatkan Renminbi sebagai mata uang dunia, oleh karena itu salah seorang ahli Meredith Champlin

mengatakan bahwa jika China ingin menjadikan Renminbi sebagai sebuah mata uang yang kuat di ranah internasional, maka hal yang terlebih dahulu hendaknya China lakukan adalah melakukan regionalisasi Renminbi-Asia Timur dan Asia Tenggara menurutnya merupakan langkah terbaik dalam regionalisasi Renminbi sebagai sebuah alat tukar. Terutama semenjak Oktober 2016 lalu, *International Monetary Fund* (IMF) secara resmi masuk dan bergabung dalam keranjang *reserve currency* di IMF, yang membuat China secara resmi diakui sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi global (“IMF Adds Chinese Renminbi to Special Drawing Rights Basket” 2016). Tidak hanya sampai di situ, bahkan laporan dari Morgan Stanley yang dikutip oleh CNBC, pada tahun 2020 saja China telah berhasil membuat Yuan menyumbang sekitar 2% dari aset cadangan devisa global dan bisa saja naik menjadi 5% dan 10% pada tahun 2030 (Evelyn Cheng 2020). Kuatnya perkembangan Renminbi dan ekonomi China ini tentunya juga dirasakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, menurut laporan dari The State of Southeast Asia tahun 2022, sebanyak 76.7% masyarakat ASEAN merasa bahwa kekuatan ekonomi China dianggap yang paling berpengaruh, disusul oleh Amerika Serikat sebesar 9,8% saja (Seah dkk. 2022).

China memang memiliki kerjasama yang kuat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam segi ekonomi. Kerjasama ini tentunya juga menguntungkan China dalam mengembangkan penggunaan Renminbi sebagai alat tukar transaksi inter-regional. Negara-negara di Asia Tenggara mulai khawatir akan dominasi Dolar serta sanksi-sanksi yang dikeluarkan oleh Washington serta SWIFT—terutama sejak terjadinya invasi Rusia ke Ukraina—membuat negaranegara di Asia Tenggara mulai mencari alternatif lain dalam hal ini. Melihat fenomena ini, tentunya merupakan kesempatan yang baik bagi China melalui the People’s Bank of China (PBOC) dalam mencapai kepentingannya untuk membuat penggunaan Renminbi dalam perdagangan dan investasi lintas batas negara semakin meluas (Robert Greene 2022). Dalam memanfaatkan fenomena ini untuk mencapai kepentingannya, China menghadirkan *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS), sebagai alternatif dalam menghindari ketergantungan dengan SWIFT beserta Dolar Amerika (Eichengreen, Blanchette, dan Brands 2022). Walaupun CIPS dapat dikatakan tidak sebesar SWIFT maupun CHIPS—milik Amerika Serikat, namun saat ini dapat dikatakan CIPS merupakan alternatif yang baik untuk China mengembangkan sayap Renminbi terutama di Asia Tenggara. China dengan negara-negara Asia Tenggara mempunyai kepentingan yang sama, dimana mereka ingin untuk meningkatkan mata uang lokal daripada terus berketergantungan dengan dolar Amerika. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur PBOC pada pertemuan Menteri Keuangan G20, bahwa China mendukung peningkatan dalam penggunaan mata uang lokal di Asia (Reuters 2022).

Tidak hanya itu, kerjasama China dan ASEAN dalam bidang ekspor impor juga sangat kuat, bagi sebagian negara-negara di ASEAN, menganggap China merupakan mitra dagang terbesar serta sumber dana investasi penting. Begitupun dengan China, yang telah menganggap ASEAN sebagai mitra dagang terbesar—bahkan total ekspor impor China terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara meningkat menjadi 7% pada tahun 2021. Bahkan sejak

akhir tahun 2021, bank-bank sentral di kawasan Asia Tenggara mulai memperbarui perjanjian mereka dengan PBOC yang secara implisit bertujuan untuk mengurangi penggunaan dolar Amerika dalam bertransaksi lintas batas negara. Tidak hanya itu, sejak 2016 bank-bank sentral di kawasan Asia Tenggara juga mengadakan ke dalam *Local Currency Settlement* (LCS), dimana ini bertujuan agar mata uang lokal di negara-negara tersebut semakin menguat dengan menekankan pada pasar valuta asing lebih likuid dan efisien.

Dengan adanya LCS ini, membuat China lebih mudah dalam menjalin perjanjian dengan bank-bank di kawasan Asia Tenggara dalam meningkatkan mata uang lokal. Contohnya seperti Indonesia yang telah melakukan perjanjian LCS pada tahun 2021, ini kemudian akan mendorong interbank untuk pasar rupiah dan renminbi (Robert Greene 2022). Kini bank-bank China telah beroperasi di 10 negara di kawasan Asia Tenggara, membuat perdagangan langsung antara renminbi dengan dolar Singapura, Baht, ringgit, serta mata uang lokal lainnya telah terealisasi. Sejak 2020 lalu, jumlah penyelesaian lintas batas transaksi melalui renminbi antara China dengan Asean sebesar 4,15 triliun yuan, dengan peningkatan yoy sebesar 72,2%, yang menyumbang 14,6% dari total jumlah penyelesaian renminbi lintas batas negara ("2021 RMB INTERNATIONALIZATION REPORT" 2021).

Kerjasama yang terus berkembang antara China dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam aspek ekonomi maupun keuangan terus membuat renminbi semakin menguat di Asia Tenggara, ini tentu jelas menjadi ancaman besar bagi dolar Amerika. Peningkatan kerjasama antara China dan Asean tentu tidak mungkin dibiarkan secara mulus oleh Amerika Serikat, pada KTT US-ASEAN di Washington dimana komitmen investasi Amerika Serikat yang ditujukan untuk melemahkan kerjasama ASEAN dengan China, Amerika Serikat juga berusaha sekuat tenaga untuk menyabotase kerjasama antara Asia Tenggara dan China dengan menebar ketidakpuasan (Reuters 2022). Walaupun peningkatan kerjasama antara China dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara terus meningkat dan membuat Renminbi semakin marak di Asia Tenggara, ini tidak menciptakan sebuah kepastian dalam kurun waktu dekat ini Renminbi akan mendominasi alat tukar transaksi lintas batas regional. Laporan dari The State of Southeast Asia pada 2022 juga menunjukkan, bahwa dibalik besarnya pengaruh China dalam kekuatan ekonomi Asia Tenggara, sebesar 64.4% responden merasa khawatir akan perkembangan ekonomi China di regional Asia Tenggara. Sedangkan, di sisi lain, sebesar 77,7% responden menerima dengan baik perkembangan ekonomi Amerika di Asia Tenggara (Seah dkk. 2022). Ini menunjukkan bahwa masyarakat Asia Tenggara tidak sepenuhnya senang akan kehadiran pengaruh ekonomi China yang besar di Asia Tenggara, misalnya dengan kehadiran inisiatif BRI di Asia Tenggara sekilas memang menguntungkan Asia Tenggara dengan adanya bantuan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut, namun di sisi lain kehadiran BRI membuat negara-negara Asia Tenggara khawatir akan hutang-hutang yang kemudian hari bisa membengkak (Premesha Saha 2021).

Melihat adanya ketidakseimbangan perdagangan antara China dan Asia Tenggara—secara keuntungan—sehingga wajar jika mereka khawatir akan peningkatan pengaruh ekonomi di China di Asia Tenggara yang memungkinkan akan berpengaruh bagi ekonomi domestik mereka. Oleh karena

itu, jika China sampai melahirkan kebijakan yang gegabah dalam menjalankan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maka China bisa saja gagal dalam menjalankan kepentingannya di Asia Tenggara untuk meningkatkan renminbi sebagai alat tukar inter-regional.

KESIMPULAN

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara masih banyak yang menggunakan dolar AS sebagai transaksi jual beli antar-negara, tetapi dalam tiga tahun terakhir banyak negara-negara kawasan Asia Tenggara berusaha untuk mempertahankan perekonomian dalam negeri mereka dengan berusaha untuk mengurangi penggunaan dolar AS. Hal tersebut dikarenakan terjadinya inflasi di negara Amerika Serikat yang menjadikan Bank Sentral (The Fed) negara tersebut harus mengambil kebijakan moneter domestiknya yaitu dengan menaikkan suku bunga yang memiliki implikasi negatif terhadap negara-negara berkembang khususnya negara kawasan Asia Tenggara. Dengan banyaknya implikasi negatif tersebut, negara-negara kawasan Asia Tenggara berusaha untuk mencari mata uang alternatif yang dapat menggantikan dominasi dolar US. Mata uang yang mendominasi di kawasan Asia Tenggara adalah dolar AS dan Yuan yang dimana Yuan dalam beberapa prosesnya sudah berhasil memenuhi beberapa standarisasi dominasi mata uang di suatu kawasan.

Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya kebijakan luar negeri China yaitu Belt and Road Initiative (BRI) yang menjadi jalan untuk China menyebarkan hegemoninya. Dalam kebijakan tersebut China berusaha untuk memprioritaskan negara-negara Asia Tenggara demi terwujudnya keinginan China yang ingin memiliki hubungan yang kerjasama saling menguntungkan satu sama lain. Alasan mengapa China memprioritaskan kawasan Asia Tenggara dikarenakan kawasan tersebut terletak di wilayah yang strategis yang dapat memudahkan untuk melakukan mekanisme kerjasama multilateral. China telah memulai meningkatkan penggunaan renminbi untuk transaksi bilateral dengan banyak negara di Asia Tenggara, mulai dari Kamboja hingga Vietnam. Peningkatan penggunaan renminbi dalam transaksi lintas batas dalam BRI merupakan bagian dari tujuan jangka panjang China melakukan internasionalisasi mata uangnya. Kerjasama antara China dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara menguntungkan China dalam mengembangkan penggunaan Renminbi sebagai alat tukar transaksi inter-regional. China menghadirkan *Cross-Border Interbank Payment System (CIPS)*, sebagai alternatif dalam menghindari ketergantungan dengan SWIFT beserta Dolar AS. China dengan negara-negara Asia Tenggara mempunyai kepentingan yang sama, dimana mereka ingin untuk meningkatkan mata uang lokal daripada terus berketergantungan dengan dolar Amerika. sejak 2016 bank-bank sentral di kawasan Asia Tenggara juga mengadakan ke dalam *Local Currency Settlement (LCS)*, yang bertujuan agar mata uang lokal di negara-negara tersebut semakin menguat dengan menekankan pada pasar valuta asing lebih likuid dan efisien.

Dengan adanya LCS ini, membuat China lebih mudah dalam menjalin perjanjian dengan bank-bank di kawasan Asia Tenggara dalam meningkatkan mata uang lokal. Kerjasama yang terus berkembang antara China dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam aspek ekonomi maupun keuangan

terus membuat renminbi semakin menguat di Asia Tenggara, ini tentu jelas menjadi ancaman besar bagi dolar Amerika. jika China sampai melahirkan kebijakan yang gegabah dalam menjalankan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, maka China bisa saja gagal dalam menjalankan kepentingannya di Asia Tenggara untuk meningkatkan renminbi sebagai alat tukar inter-regional.

DAFTAR PUSTAKA

- People's Bank of China. (2021). "2021 RMB Internationalization Report."
- Burchill, Scott. 2005. *The National Interest In International Relations Theory*. Houndmills: Palgrave.
- Cai, Peter. (2017). "Understanding China's Belt and Road Initiative." Lowy Institute For International Policy.
- Chey, Hyoung-kyu. (2013). "Can the Renminbi Rise as a Global Currency?" *Asian Survey* 53 (2): 348–68. <https://doi.org/10.1525/as.2013.53.2.348>.
- The Star. (2017) . "China's BRI Seen Boosting Trade with ASEAN to US\$2.1 Trillion." . The Star.
<https://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/05/20/chinas-bri-seenboosting-trade-with-asean-to-us21-trillion/>. Diakses pada 29 Desember 2022.
- Devetak, Richard, Anthony Burke, dan Jim George. (2012). *An Introduction to International Relations*. 2nd ed. New York: Cambridge University Press.
- Eichengreen, Barry, Jude Blanchette, dan Hal Brands. (2022). "Sanctions, SWIFT, and China's Cross-Border Interbank Payments System." Center for Strategic and International Studies (CSIS). <http://www.jstor.org/stable/resrep41418>.
- Eichengreen, Barry, dan Masahiro Kawai. (2015). *Renminbi Internationalization: Achievements, Prospects, and Challenges*. Tokyo: Asia Development Bank Institute.
- Cheng, Evelyn. (2020). "China's Yuan Could Become the World's Third Largest Reserve Currency in 10 Years, Morgan Stanley Predicts." CNBC. <https://www.cnbc.com/2020/09/04/chinasyuan-rmb-to-become-third-largest-reserve-currency-by-2030-morgan-stanley.html>. Diakses pada 29 Desember 2022
- Gong, Xue. (2019). "The Belt and Road Initiative and China's Influence in Southeast Asia." *Pacific Review* 32 (4).
- Hadijah Alaydrus. (2022). "Saham Asia Tenggara Jadi Primadona Di Tengah Kenaikan Suku Bunga The Fed Dan Lockdown China." *Ekonomi Bisnis*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220508/620/1530730/saham-asia-tenggara-jadiprimadona-di-tengah-kenaikan-suku-bunga-the-fed-dan-lockdown-china>. Diakses pada 28 Desember 2022.
- Hao, Kaixuan, Liyan Han, dan (Tony) Wei Li. (2022). "The Impact of China's Currency Swap Lines on Bilateral Trade." *International Review of Economics & Finance* 81 (September): 173–83. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.05.004>.

- Holsti, Kalevi J. (1981). *International Politics: Framework For Analysis*. New Delhi: Prentice Hall of India.
- International Monetary Fund. (2016). "IMF Adds Chinese Renminbi to Special Drawing Rights Basket." IMF NEWS. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/29/AM16-NA093016IMF-Adds-Chinese-Renminbi-to-Special-Drawing-Rights-Basket#:~:text=Effective%20October%201%2C%20the%20IMF,Special%20Drawing%20Right%2C%20or%20SDR>. Diakses pada 29 Desember 2022.
- Jing, Shi. (2022). "China to Advance RMB Internationalization." Chinadaily. <https://www.chinadaily.com.cn/a/202210/11/WS6344309da310fd2b29e7baa4.html>. Diakses pada 29 Desember 2022.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Disunting oleh Vicki Knight. 4th ed. Singapura: Sage Publications Inc.
- Aldila, Nindya. (2022). "Pasar Di ASEAN Lebih Tahan Banting Setelah Rencana Kenaikan The Fed." Ekonomi Bisnis. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220130/620/1495006/pasardi-asean-lebih-tahan-banting-setelah-rencana-kenaikan-the-fed>. Diakses pada 28 Desember 2022.
- Saha, Premesha. (2021). *Mapping The Belt And Road Initiative, Implications, Consequences*. Disunting oleh Harsh V Pant dan Premsha Saha. New Delhi: Observer Research Foundation.
- Reuters. (2022). "China to Work with Asian Neighbours to Grow Use of Local Currencies over US Dollar in Trade, Investment." South China Morning Post. https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3167252/china-work-asianneighbours-grow-use-local-currencies-over?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article&campaign=3167252. Diakses pada 28 Desember 2022.
- Greene, Robert. (2022). "Southeast Asia's Growing Interest in Non-Dollar Financial Channels – and the Renminbi's Potential Role." Carnegie Endowment For International Peace. <https://carnegieendowment.org/2022/08/22/southeast-asia-s-growing-interest-in-nondollar-financial-channels-and-renminbi-s-potential-role-pub-87731>. Diakses pada 27 Desember 2022
- Koehane, Robert O. (2006). "Cooperations And International Regimes." Dalam *Perspectives on World Politics*, 81. London: Routledge.
- Seah, Sharon, Joanne Lin, Sithanoxay Suvannaphakdy, Melinda Martinus Pham, Thi Phuong, Thao Farah, Nadine Seth Hoang, dan Thi Ha. (2022). "Southeast Asia 2022 Survey Report Report Compiled And Written By." www.iseas.edu.sg.
- Sonny. (2020). "Indonesia Di Tengah Himpitan Perang Dagang Amerika Serikat dan China." *Jurnal Renaissance* 5 (1): 617-23.
- Thaher, Irmanjaya. (2022). *Strategi Menghadapi Belt And Road Initiative China (Optimalisasi Regulasi Kerja Sama Indonesia-China)*. 1st ed. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

- Subroto, Vivi Kumalasari. (2021). "Mengapa Dollar As Digunakan Sebagai Mata Uang Dunia?" Universitas Stekom. <http://komputerisasi-akuntansid4.stekom.ac.id/informasi/baca/MENGAPA-DOLLAR-AS-DIGUNAKAN-SEBAGAIMATA-UANG-DUNIA/f9a2d0319fbe0802c17a9909108d43c7e9c326ef>. Diakses pada 28 Desember 2022.
- Global Times. (2022). "Western Sanctions Spark Anxiety among Businesses over Dollar Hegemony." Global Times. <https://www.globaltimes.cn/page/202203/1253845.shtml>. Diakses pada 29 Desember 2022.
- Wijaya, Handriyanto. (2020). "Aktualisasi Kebijakan China One Belt And One Road Di Indonesia Melalui Pembangunan Kereta Cepat Jakartabandung." *Jurnal Dinamika Global* 5 (01): 109–22. <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.160>.